



KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PENATAAN KEBIJAKAN CUKAI

OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN PENCEGAHAN KORUPSI

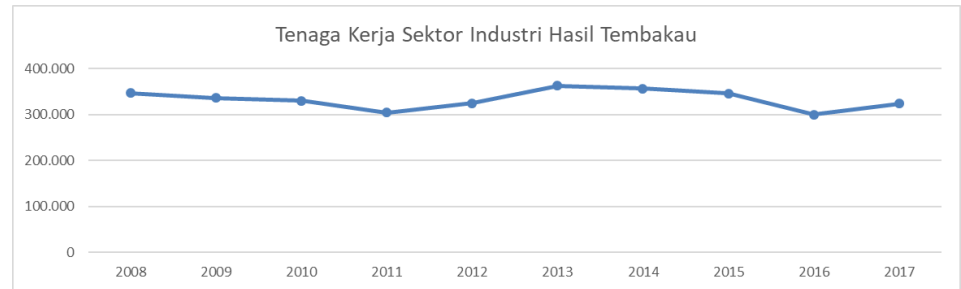
8 September 2020



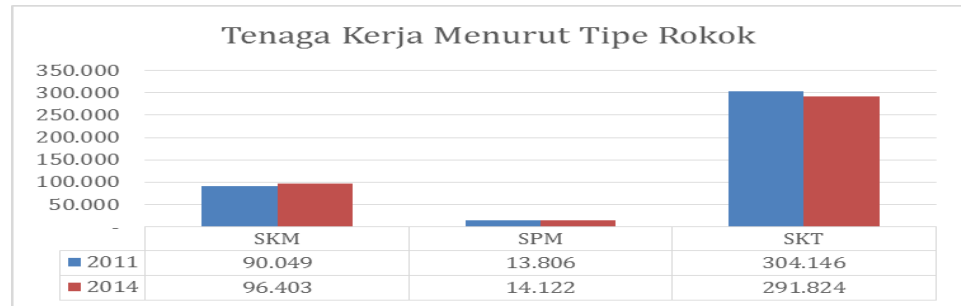
ASPEK PERMASALAHAN

INDUSTRI DAN TENAGA KERJA – PERTANIAN – PERDAGANGAN – KESEHATAN – FISKAL – COVID19

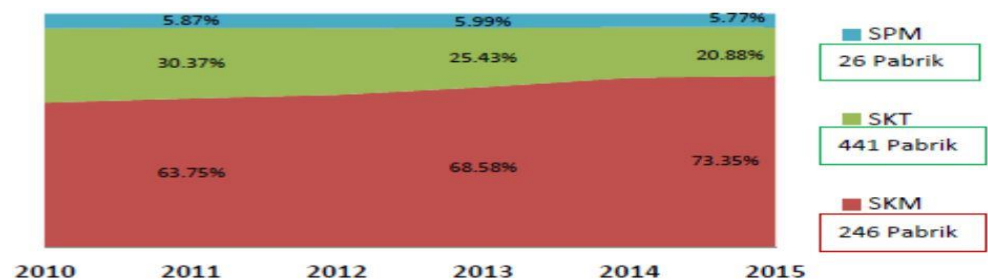
- **Tren Dunia:** Secara global IHT mulai ditinggalkan karena aspek kesehatan. Indonesia relatif konservatif sehingga menjadi daya tarik bagi industri IHT asing.
- **Mesinisasi:** Industri hasil tembakau cenderung beralih menggunakan mesin produksi agar lebih efisien. Terlihat pangsa pasar SKT lambat laun tergerus SKM.
- **Rokok Elektrik:** Pangsa pasar IHT tergerus rokok elektrik seperti vape. Produsen hasil tembakau asing memperkenalkan produk IQOS.



Gambar 1. Jumlah tenaga kerja industri hasil tembakau
Sumber: Statistik Tenaga Kerja, BPS, 2008-2017



Gambar 2. Jumlah tenaga kerja industri hasil tembakau
Sumber: Kementerian Keuangan, 2015



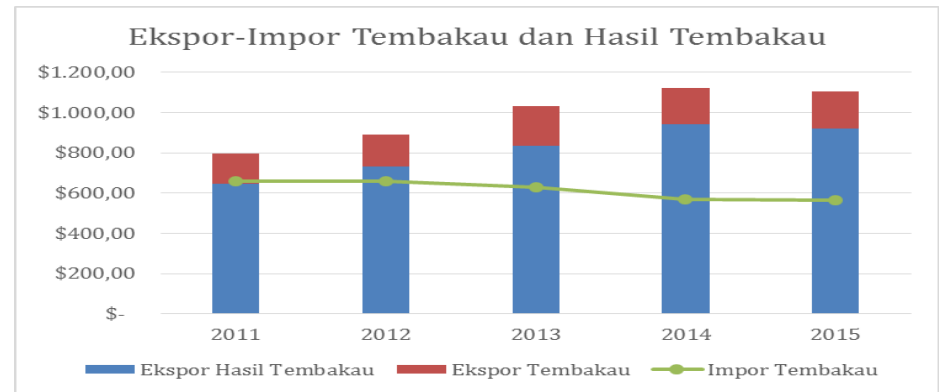
Gambar 3. Pangsa pasar rokok di Indonesia
Sumber: Kementerian Keuangan, 2015



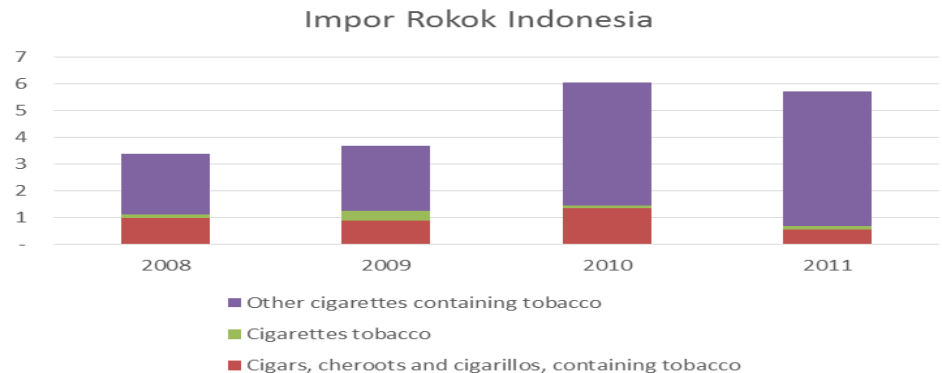
ASPEK PERMASALAHAN

INDUSTRI DAN TENAGA KERJA – PERTANIAN – PERDAGANGAN – KESEHATAN
– FISKAL – COVID19

- Indonesia net importir tembakau.
- Neraca perdagangan Indonesia untuk tembakau dan hasil tembakau masih positif.
- Ekspor hasil tembakau terancam keberlanjutannya. Indonesia satu-satunya negara besar dari <10 negara yang belum meratifikasi FCTC sama sekali.
- Opsi kebijakan IHT?
 - Meningkatkan ekspor.
 - Meningkatkan produksi tembakau dalam negeri dan membatasi impor.
 - Menurunkan konsumsi hasil tembakau (rokok) dalam negeri.



Gambar 4. Nilai ekspor-impor industri hasil tembakau dan tembakau (dalam juta US\$)
Sumber: Statistik Ekspor-Impor (BPS, 2015),
Buku Statistik Tembakau (Kementerian Pertanian, 2015)



Gambar 5. Nilai impor industri hasil tembakau (dalam juta US\$)
Sumber: Pusdatin Kementerian Perindustrian, 2011



ASPEK PERMASALAHAN

INDUSTRI DAN TENAGA KERJA — **PERTANIAN** — PERDAGANGAN — KESEHATAN — FISKAL — COVID19

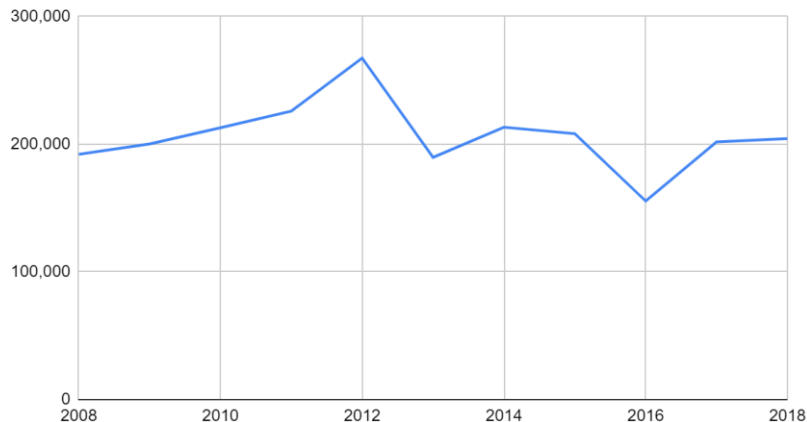
- **Pembatasan impor.** Akan mendorong kenaikan harga tembakau dan mendorong perluasan lahan tembakau karena saat ini hanya sanggup memenuhi 40% kebutuhan industri dalam negeri.
- **Lahan tidak tak terbatas (tembakau vs pangan).**
- Tren luas area tembakau di lahan pemerintah dan swasta terus menurun. Luas area petani kecil cenderung stabil, naik dan turun mengikuti harga/mechanisme pasar.

“Kami akan utamakan beras, kedelai, dan jagung.”

Presiden Joko Widodo, 2016



Luas Perkebunan Rakyat (Ha)



Gambar 6. Luas Perkebunan Rakyat

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia, 2019, Kementerian Pertanian

Luas Perkebunan Besar (Ha)



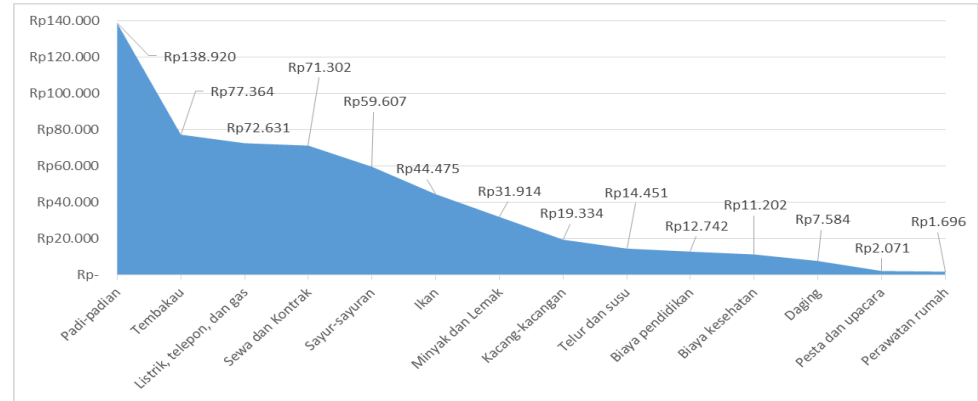
Gambar 7. Luas Perkebunan Besar

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia, 2019, Kementerian Pertanian

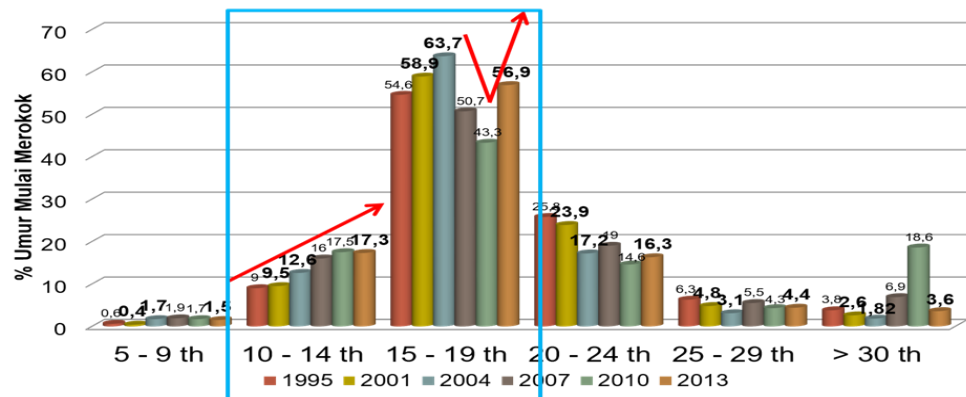


ASPEK PERMASALAHAN

- Rokok menempati peringkat dua konsumsi rumah tangga miskin (RTM). RTM lebih memilih belanja rokok daripada belanja makanan bergizi. Hal ini akan berdampak pada kualitas SDM di masa yang akan datang.
- Target RPJMN untuk menurunkan prevalensi perokok di bawah umur menjadi 5.4% di tahun 2019, tidak tercapai. Prevalensi perokok di bawah umur justru meningkat dari 7.2% (2013) menjadi 9.1% (2018). (Riskesdas, 2018)
- Konsumsi rokok di keluarga berkorelasi terhadap prevalensi *stunting* dan tingkat kemiskinan. (Dartanto, 2018)



Gambar 8. Distribusi Pengeluaran Rumah Tangga Termiskin Tahun 2011
Sumber: Survei Kesehatan Nasional, 2011, Badan Pusat Statistik



Gambar 9. Umur mulai merokok, Indonesia 1995-2013
Sumber: Susesnas 1995, 2004 SKRT 2001, Riskesdas 2007, 2010, 2013

**JANGAN SAMPAI
ADA UANG DIPAKAI
UNTUK BELI ROKOK
DAN TIDAK DIPAKAI
UNTUK MENAMBAH
GIZI ANAKNYA //**

Presiden Joko Widodo

**RAKER
KES 20
NAS 17**





TARGET PENERIMAAN CUKAI

TARGET PENERIMAAN

INDUSTRI DAN TENAGA KERJA – PERTANIAN – PERDAGANGAN – KESEHATAN – **FISKAL** – COVID19

- Dengan memperhatikan faktor ekonomi dan kebijakan, target penerimaan cukai hasil tembakau meningkat sebesar **7,2 persen** di 2019 dan **9 persen** di 2020. (Sumber: Kemenkeu)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2019 dan APBN 2020



Pertumbuhan Ekonomi (%)

Realisasi 2017

Realisasi 2018

APBN 2019

APBN 2020

5,07

5,4

5,1

5,3



Inflasi (% yoy)

3,61

3,5

3,1

3,1

Target Penerimaan Cukai (milyar rupiah)

APBN 2018

APBN 2019

APBN 2020

Kenaikan 2019-2020



Hasil Tembakau

148.230

158.860

173.145

9%



Etil Alkohol

170

160

154

-3,8%



MMEA

6.500

5.990

7.130

19%



Cukai Lainnya (kantong plastik)

500

500

99

-80,2%

Total

155.400

165.500

180.530

9,08%



TARIF CUKAI 2020

JENIS HASIL TEBBAKAU	GOL Produksi	TARIF CUKAI 2018/2019	TARIF CUKAI 2020	Batasan HJE Min. 2018/2019	Batasan HJE Min. 2020	% KENAIKAN TARIF (Rerata Tertimbang)	% KENAIKAN HJE (Rerata Tertimbang)
		(Rp/Btg)					
SKM	I	590	740	1.120	1.700	25%	52%
	II	385	470	896	1.275	22%	42%
		370	455	715	1.020	23%	43%
SPM	I	625	790	1.130	1.790	26%	58%
	II	370	485	936	1.485	31%	59%
		355	470	640	1.015	32%	59%
SKT/ SPT	I	365	425	1.261	1.460	16%	16%
		290	330	890	1.015	14%	14%
	II	180	200	470	535	11%	14%
	III	100	110	400	450	10%	13%
						23%	35%

KENAIKAN TARIF CUKAI:

1. Jenis SKM berada dikisaran 22% - 25%
2. Jenis SPM berada dikisaran 26% - 32%
3. Jenis SKT/SPT berada dikisaran 10% - 16%

KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN:

1. Jenis SKM berada dikisaran 42% - 52%
2. Jenis SPM berada dikisaran 58% - 59%
3. Jenis SKT/SPT berada dikisaran 13% - 16%

PERTIMBANGAN PENENTUAN KEBIJAKAN TARIF & HJE:

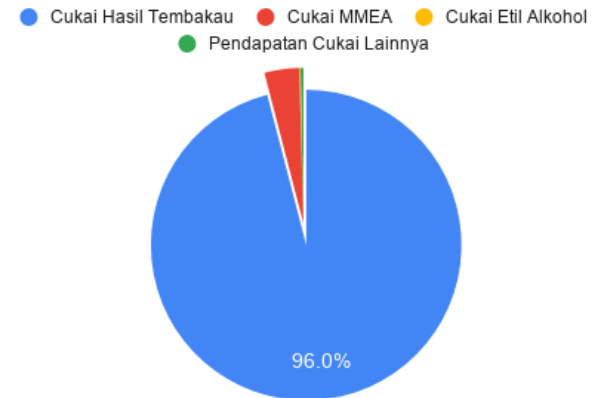
1. Jenis Hasil Tembakau (Buatan Mesin/Tangan)
2. Jenis Industri (Padat Modal/Padat Karya),
3. Golongan Produksi Pabrik (Besar/Menengah/Kecil),
4. Tingkat Kandungan Bahan Baku Dalam Negeri/ TKDN (Tembakau dan/atau Cengkeh)

1. Layer tarif cukai HT tetap dipertahankan menjadi 10 layer (tidak ada simplifikasi layer di 2020)
2. Kenaikan tarif dan HJE SKT (padat karya) dijaga tetap rendah untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja .
3. Preferensi tarif cukai untuk SKT selama beberapa tahun terakhir dapat menstimulus produksi & serapan tenaga kerja (buruh linting baru)
4. Pengaturan batas minimal HTP tetap dipertahankan 85% dari HJE



ARAH KEBIJAKAN

- 96% pendapatan cukai berasal dari cukai hasil tembakau.
- Indonesia merupakan negara dengan jumlah barang kena cukai terendah di dunia.
- **Arah kebijakan pemerintah tentang kebijakan cukai:**
 - Simplifikasi dan peta jalan
 - Beban jaminan sosial kesehatan atas penyakit katastropik dan penyakit tidak menular
 - Diversifikasi cukai: kantong plastik dan minuman bergula
 - Evaluasi terhadap kebijakan berjalan



Gambar 10. Proporsi Cukai APBN 2019, Kementerian Keuangan

KATASTROPIK	2018		s.d. Maret 2019	
	Biaya	%	Biaya	%
JANTUNG	10,545,485,639,809	51.62%	2,818,697,372,221	49.81%
GAGAL GINJAL	2,395,347,020,362	11.72%	672,404,727,884	11.88%
KANKER	3,406,308,675,470	16.67%	1,009,293,360,950	17.83%
STROKE	2,565,601,469,065	12.56%	699,229,200,542	12.36%
THALASSAEMIA	490,997,712,556	2.40%	148,640,271,800	2.63%
CIRRHOSIS HEPATIS	334,220,059,770	1.64%	93,006,377,130	1.64%
LEUKAEMIA	333,326,835,880	1.63%	109,018,079,270	1.93%
HAEMOPHILIA	358,121,722,285	1.75%	109,106,198,470	1.93%
TOTAL KATASTROPIK	20,429,409,135,197		5,659,395,588,267	
Total Biaya Pelkes	94,297,340,885,513		25,511,752,549,354	
% Katast terhadap biaya pelkes		21.66%		22.18%

Gambar 11. Penyakit Katastropik, BPJS Kesehatan



- **Dampak cukai terhadap pengendalian konsumsi:** mengurangi penyakit tidak menular. Komorbid meningkatkan faktor risiko kematian akibat Covid-19
- **Edukasi masyarakat melalui harga produk:** prioritas konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Contoh: saat ini susu murni lebih mahal daripada susu bergula/berperisa
- Pertumbuhan penerimaan cukai tercatat sebesar 7,01% (YoY). Pertumbuhan cukai hasil tembakau mencapai 8,09% (YoY) dan cukai etil alcohol mencapai 164,05% (YoY).

No.	Jenis Penerimaan	Target PP 72	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2019	2020	2019	2020	
1	BEA MASUK	31,83	20,69	19,04	-3,42%	-7,97%	59,80%
2	CUKAI	172,20	82,62	88,42	22,30%	7,01%	51,35%
	Hasil Tembakau	164,94	79,15	85,55	22,50%	8,09%	51,87%
	Etil Alkohol	0,15	0,07	0,19	-6,62%	164,05%	122,23%
	MMEA	7,10	3,36	2,64	18,45%	-21,44%	37,22%
	Denda Adm. Cukai	-	0,03	0,03	31,90%	1,08%	-
	Cukai Lainnya	-	0,01	0,01	24,49%	-23,78%	-
	Plastik	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
3	BEA KELUAR	1,65	1,85	1,61	-52,72%	-13,19%	97,13%
	TOTAL	205,68	105,16	109,06	13,21%	3,71%	53,02%
	PPN Impor		97,29	81,03	-4,52%	-16,71%	
	PPn BM Impor		2,63	1,88	5,34%	-28,48%	
	PPH Pasal 22 Impor		32,39	21,26	1,20%	-34,37%	
	Total PDRI lainnya		132,31	104,17	-2,99%	-21,27%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		237,47	213,24	3,57%	-10,21%	

Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai
Sumber: APBN Kita Kinerja dan Fakta, Kemenkeu, 2020



- **Simplifikasi tarif dan penetapan peta jalan tarif cukai untuk 5 tahun.** Transparan dan menghindari tawar menawar.
- **Adopsi WHO *Framework Convention on Tobacco Control*.** Mengadopsi rekomendasi untuk mengurangi korupsi, intervensi perusahaan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan cukai dan penetapan tarif.
- **Mendorong peran akademisi dan masyarakat sipil.** Khususnya dalam evaluasi dan monitoring implementasi kebijakan cukai.



TERIMA KASIH